

Pasar Gelap Politik Indonesia

ATMOSFIR kompetisi politik sudah mulai kita setiap kali menjelang pemilu. Iklan-iklan politik mulai membanjiri media massa. Poster dan bendera partai maupun calon legislatif mulai mengepung sudut-sudut negeri, sepanjang kota dan desa. Dengan teks dan visual yang kadang sedikit narsis dan mesianistik, para tokoh politik menjadi juru iklan bagi sebuah merk kecap: semuanya mengklaim sebagai nomor satu, semuanya mentasbihkan diri sebagai penyelamat keadaan dan pembawa obor perubahan. Begitulah, tiba-tiba panggung politik Indonesia didatangi banyak para mesiah, yang datang dari dunia antah-berantah.

Ongkos untuk menghelat pesta demokrasi kini begitu tinggi. Bukan saja dalam bentuk anggaran, tetapi juga sirkulasi modal yang beredar di masing-masing peserta, baik partai maupun calon legislatif. Akan sangat ironis rasanya jika biaya politik yang amat mahal itu hanya berakhir dengan lahirnya sistem politik yang dekaden, munculnya aktor yang jauh dari standar, serta hanya menjadi panggung bagi infantilitas politik kaum elite.

Dalam gugusan gelombang demokrasi, kita masuk pada fase keempat dimana pada akhirnya, demokrasi banyak ditentukan oleh bekerjanya institusi politik pada kehidupan masyarakat secara riil. Inilah fase pendalaman demokrasi (*deepening of democracy*). Kegagalan melakukan pendalaman akan melahirkan risiko yang amat besar bagi seluruh konstruksi politik negeri ini. Masih dominannya aktor dan elite politik lama dalam panggung politik, munculnya kekuatan konservatif pesaing partai yang berasal dari kelompok sosial dan keagamaan, militer yang belum sepenuhnya ikhlas meninggalkan arena politik, adalah serangkaian faktor yang bisa mengancam proses transisi demokrasi. Dapat pula ditambahkan, penyerahan kehidupan politik pada supremasi sipil juga tidak selalu membuat proyek transisi berjalan dengan mulus selama masih muncul *uncivilian mentality* di kalangan sipil dalam berdemokrasi.

Kualifikasi dan sirkulasi aktor politik yang memiliki kompatibilitas dengan lembaga politik baru merupakan faktor penting bagi proses pendalaman demokrasi. Politik Indonesia hari ini berlangsung dalam ruang sosial-ekonomi yang sangat rapuh, yang menghidupkan

semacam darwinisme politik. Jumlah penganggur yang masih tinggi, dunia kerja yang amat sempit, disparitas sosial yang masih menganga, menjadi arena bagi kegiatan berpolitik masyarakat kita. Dalam kondisi semacam itu, politik menjadi semacam kanalisasi sosial-ekonomi yang dirasa begitu sesak. Dunia politik bagi generasi politik baru adalah sebuah dunia vocational. Politik hari ini adalah pasar yang dikelola dengan cara yang lain. Dan generasi baru politik yang hadir belakangan datang dari wilayah-wilayah yang *market friendly*. Politik adalah tanah yang dijanjikan bagi akumulasi modal dan kekuasaan. Maka, ketika para aktor telah tiba di tanah yang dijanjikan itu, banyak yang enggan kembali.

Karena dunia politik adalah dunia vocational, maka ia menjadi arena yang amat keras untuk dipertaruhkan. Dengan logika seperti itu, hubungan antara partai dengan aktor-aktornya bukanlah hubungan yang organik, tetapi hubungan instrumental. Bisa dipahami jika yang kemudian terjadi dalam kehidupan kepartaian negeri ini bukan saja fenomena *swing voters*, tetapi juga jangan-jangan malah muncul "*swing actors*". Jika *swing voters* dipahami sebagai sebuah bentuk oportunisme pemilih, maka "*swing actors*" juga merupakan manifestasi dari oportunisme kalangan elite. Kita bisa melacak hipotesis ini dengan munculnya "koalisi yang aneh" dan kadang "ajaib" yang dilakukan partai politik di berbagai daerah dalam peristiwa pilkada.. Jika *swing voters* merupakan bentuk kebingungan pemilih dalam melakukan proses identifikasi politik, maka *swing actors* adalah bentuk tiadanya koherensi antara aktor dan institusi politik seperti partai. Ideologi benar-benar telah mati dalam fenomena itu. Fenomena itu secara dramatis telah meletakkan berbagai *platform* partai di laci meja sekretariat partai.

Pasar Gelap

Kini demokrasi ada dalam pusaran industri. Demokrasi industrial di satu sisi telah mengakhiri segregasi antara ekonomi dan politik, tetapi pada saat yang sama menciptakan segregasi yang semakin nyata antara massa dan aktor politik. Politik dan ekonomi, pada potretnya kini, menjadi dua wilayah yang saling mengkorporasi satu sama lain. Sistem otoriter telah memunculkan korporasi oleh negara yang merupakan institusi politik atas kehidupan ekonomi. Sistem liberal memunculkan sebaliknya. Sistem neo-liberal "menyempurnakan" hubungan itu dalam logika *win-win solution* dan mekanisme "bagi hasil"

antara kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Keduanya – kekuatan politik dan kekuatan ekonomi – kini menjadi kuat jika tampil bersama yang boleh jadi sedang meneriakkan slogan: “Bersama kita bisa.”

Karena demokrasi liberal hanya berlangsung pada level instrumental, maka lanskap politik multipartai di Indonesia lebih mengarah pada terciptanya pasar gelap. Anda yang pernah mampir di pasar gelap (*black market*) pasti tahu tentang kualitas barang atau produk yang dijual di sana. Hanya nasib mujur yang membuat kita bisa menemukan produk yang bagus. Orisinalitas dan otentisitas bukan sesuatu yang penting di pasar gelap. Yang penting adalah kemasan (*packaging*) dan sedikit provokasi para sales. Jangan pernah berharap bisa menagih garansi, karena banyak produk yang lahir dari model rekondisi. Cacat produk tak pernah bisa diklaim di sebuah pasar gelap. Dorongan untuk memilih produk selalu dipengaruhi oleh isu dan iklan yang spartan ketimbang dorongan-dorongan logis, apalagi dorongan moral.

Kehidupan demokrasi kita hari ini nampaknya mirip-mirip dengan dunia pasar gelap. Di sana aktor dan partai datang silih berganti, mengibarkan partai, memuntahkan iklan dan janji, tetapi kita tidak bisa berharap akan garansi politik dari semua itu. Kanibalisme produk adalah khas kehidupan di pasar gelap. Maka tampillah aktor-aktor dan elite rekondisi dari partai-partai hasil proses kanibalistik. Aktor dan elite politik yang memiliki otentisitas harus tersingkir karena tidak cukup punya tempat dalam politik yang berbiaya tinggi.

Kekuatan-kekuatan *civil society* dan media massa yang mampu memberi tafsir kritis senantiasa dibutuhkan untuk mencegah kristalisasi pasar gelap dalam panggung politik negeri ini. Masyarakat harus terus mendapat pencerahan dari kalangan-kalangan kritis supaya tidak mudah terpesona dalam aneka iklan yang bisa dipastikan akan makin mengepung menjelang perhelatan pemilu nanti. Kita diingatkan oleh pepatah lama, “cerita tentang bulan, bukanlah bulan...”. Dan cerita tentang perubahan, bukanlah perubahan. Dan demokrasi, tak akan pernah bisa tegak, hanya oleh advertensi.**

(pernah dimuat di *Harian Jawa Pos*)